UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Brotodihardjo, R. Santoso, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.

_____, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Meliala, Djaja S., 1987, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, Binacipta Bandung, Bandung.

Mustafa, Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.

Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.

_____, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siahaan, Marihot P., 2010, *Hukum Pajak Material: Objek, Subyek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Smith, Adam, 1976, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Oxford University Press, Oxford.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung.

_____, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

Suandi, Erly, 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014-292.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo, Nomor 9 Tahun 2010, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo 2010-1b.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Nomor 37.

Peraturan Bupati Badung, Nomor 72 Tahun 2014, *Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Berita Daerah Kabupaten Badung 2014-72.

C. Tesis

Larasati, Luh Devy, "*Freies Ermessen* Dinas Pendapatan Daerah Tentang *Verifikasi* Nilai Objek Pajak Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Badung", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.

Melinda, Resky, "Penetapan Nilai Transaksi Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Relevansinya dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Sulistiyaningsih, Rini, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Boyolali", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

D. Internet

Taniau, Adolfina, 2018, "Inilah Upaya Bapenda Kota Jayapura dalam Meningkatkan PAD Melalui Sektor Pajak", www.nokenlive.com, diakses pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019.

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, "Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun 2013-2017", www.dispenda.jayapurakota.go.id, diakses pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Danang Averroes Al-Khawarizmi, "Pendapatan Asli Daerah", www.negarahukum.com, diakses pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Agustina Afaar, selaku Narasumber, yang mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019.

Hasil Wawancara dengan Ilham Marowa, selaku Narasumber, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019.

Hasil Wawancara dengan Hartono, selaku Responden, yang mewakili Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019.

Hasil Wawancara dengan salah satu PPAT Kota Jayapura, selaku Responden, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019.

Hasil Wawancara dengan Adolfina Taniau, selaku Responden, selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019.

F. Kuesioner

Hasil Jawaban Kuesioner, selaku Responden, PPAT Kota Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019.

G. Arsip

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2019, *Data Target dan Realisasi BPHTB Pertahun*, Jayapura.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN 1

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Andriya, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://pd.repository.ugm.ac.id/

PEMDA KOTA JAYAPURA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar **1**
Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Aditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PETUNJUK PENGISIAN SSPD

- Formulir ini terdiri dari 5 (lima) rangkap Lembar pertama untuk Wajib Pajak (WA) sebagai bukti pembayaran, Lembar kedua untuk Badan pendapatan daerah melalui Bank Papua Lembar ketiga untuk Badan Pendapatan Daerah disampaikan oleh WP, Lembar keempat untuk Kantor Penerima Pembayaran (Bank Papua) Dan lembar kelima untuk PPAT/Notaris
- Isilah SSPD ini dengan huruf cetak kapital atau diketik
- Gunakan satu SSPD untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan suatu pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP

CARA PENGISIAN

- Kantor Badan Pendapatan Daerah diisi meliputi letak tanah dan atau bangunan
- Huruf A. Diisi dengan data WP

  Angka 1 s.d Angka 7 Cukup jelas

- Huruf B. Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

  Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

  Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

  Angka 7 s.d Angka 13. Merupakan tabel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

  Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan.

  Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB, angka 9 dan 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan

  Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi / harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang / nilai-nilai pasar objek tersebut.

  Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut.

Jenis Perolehan Hak	*Kode*	*Jenis Perolehan Hak*	*Kode*	*Jenis Perolehan Hak*	*Kode*
Pemindahan Hak :		- Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran Usaha	12
** Jual beli*	*01*	- Pemisahan hak yang mengakibatkan pemisahan	07	- Hadiah	13
** Tukar Menukar*	*02*	- Penunjukan pembeli dalam lelang	08	- Pemberian Hak Baru	
** Hibah*	*03*	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	14
** Hibah Wasiat*	*04*	- Penggabungan Usaha	10	- Pemberian Hak Baru Pelepasan Hak	15
** Waris*	*05*	- Peleburan Usaha	11		

  Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat tanah

- Huruf C. Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (PBHTB) oleh WP.
  Dalam hal SSPD digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf Db atau berdasarkan huruf D d. Huruf C tidak perlu diisi.

  Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13

  Angka 2. Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh kepala kanwil ditjen pajak atas nama menteri keuangan (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui kantor pelayanan PBB setempat)

  Angka 3. Cukup Jelas.

  Angka 4. Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarip pajak sebesar 5% (sesuai pasal 5 UU No. 21 tahun 1997).

  Angka 5 Diisi ▶ Sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelaan.
  ▶ Sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat / pemberi hak pengelolaan. Sebagaimana dimaksud pada angka 5

- Huruf D. Diisi dengan memberi tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan dasar setoran pajak.

  Huruf a. Menurut perhitungan WP sebagimana huruf C

  Huruf b. ▶ Menurut Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB), atau
  ▶ Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) atau
  ▶ Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

  Huruf c. Diisi dalam hal WP menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terhutang karena :

  Huruf d. Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang Menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

  * Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diasir)

Catatan - Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD dengan memberi keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6

- SSPD nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dengan menandatangani kolom yang telah Disediakan (WP tidak perlu ke Bank / Kantor pos Persepsi).
- SSPD nihil lembar ke - 2, SSPD nilai lembar ke - 3, dan SSPD nilai lembar ke - 4 disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB oleh WP.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.id/

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 1 — Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. N I K :
3. Alamat Wajib Pajak : JL.A.YANI
4. Kelurahan/Desa : Gurabesi 5. RT/RW : 002 / 003 6. Kecamatan : Jayapura Utara
7. Kabupaten / Kota : Jayapura 8. Kode Pos :

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Letak Tanah Dan Bangunan : JL.SMP KOYA BARAT
3. Kelurahan/Desa : KOYA BARAT 4. RT/RW : 000 / 00
5. Distrik : MUARA TAMI 6. Kota : JAYAPURA

Penghitungan NJOP PBB

Uraian		Luas (M2)			NJOP PBB/M2		Luas x NJOP PBB/M2	
Tanah (Bumi)	7.	10.000	M2	9.	27.000,00	11. Rp.	270.000.000,00	
Bangunan	8.	0	M2	10.	0,00	12. Rp.	0,00	
					NJOP PBB :	13. Rp.	270.000.000,00	

15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 01
14. Harga Transaksi / Nilai Pasar: Rp. 1.000.000.000,00

Nomor Sertifikat : HM/03890/KOYA BARAT

C. Perhitungan BPHTB (Hanya dapat berdasarkan penghitungan wajib pajak)

			Rp.
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) *memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14*		1.	Rp. 1.000.000.000,00
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2.	Rp. 60.000.000,00
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3.	Rp. 940.000.000,00
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terhutang	*5% x angka 3*	4.	Rp. 47.000.000,00
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Harus Dibayar		5.	Rp. 47.000.000,00

D. Jumlah Setoran Berdasarkan
- [x] A. Perhitungan Wajib Pasak
- [ ] B. STPD BPHTB/SKPD KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal :
- [ ] C. Pengurangan Dihitung Sendiri menjadi [0][0]
- [ ] D. 01 Jual Beli

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) Rp. 47.000.000,00
Dengan huruf: EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH

Jayapura, 27-06-2019 WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB	Telah Diverifikasi BAPENDA KOTA JAYAPURA
HENDRIK HILTON MOE	, MM	BANK PAPUA CABANG UTAMA JAYAPURA 01 JUL 2019 Silvia P. Reba	, SE, MH
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh petugas Bapenda — Nomor Dokumen : 82.71.2019.27.06.065 — NOP PBB baru :

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN 3

PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PENGURUS DAERAH KOTA JAYAPURA
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(I.P.P.A.T)

SURAT KETERANGAN
No. /Pengda-IPPAT/IV/2019

Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **DHENNIA AUDRI HERLANDINA**
NIM	: 17/417988/PHK/09880
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat	: Jalan Melati XV/F 665, RT 06/RW 12, Perumahan Fajar Indah, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
No. Telp/HP	: 081393308115
Dosen Pembimbing	: Anugrah Anditya, S.H., M.T
Judul Penelitian	: Praktik Penetapan Besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna memperoleh data dalam rangka penulisan Tesis, pada tanggal 25 April 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 27 April 2019

PENGURUS DAERAH KOTA JAYAPURA

IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(IPPAT)

ILHAM MAROWA, S.H., M.Kn

Ketua

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LAMPIRAN 4

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PRAKTIK PENETAPAN BESARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) TERUTANG OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
DHENNIA AUDRI H. Anugrah Anditya, S.H., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kabupaten III No. 2 – Tlp. (0967) 535749 – 537380, Kota Jayapura

SURAT KETERANGAN

Nomor : 973 / 469 / 2019

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nomor: 830/UN1/HK.1.1/MKN/PJ/2019, perihal Permohonan Izin Penelitian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura menerangkan bahwa:

Nama	: **DHENNIA AUDRI HERLANDINA**
NIM	: 17/417988/PHK/09880
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Alamat	: Jalan Melati XV/F 665, RT 06/RW 12, Perumahan Fajar Indah, Baturan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
No. Telp/HP	: 081393308115
Dosen Pembimbing	: Anugrah Anditya, S.H., M.T
Judul Penelitian	: Praktik Penetapan Besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna memperoleh data dalam rangka penulisan Tesis, pada tanggal 2 Mei 2019, dengan materi penelitian:

1. Proses pemungutan BPHTB di Kota Jayapura;
2. Kebijakan pengenaan BPHTB di Kota Jayapura.

DemikianSurat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 2 Mei 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

ROBBY KEPAS AWI, S.E., M.M.
PEMBINA
NIP. 19730818 200312 1 003